



Jurnal Politeknik Caltex Riau

<https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>

| e- ISSN : 2476-9460 (Online) | p- ISSN : 2085-0751 (Print)

## Menilik Fenomena Akuntansi Badan Usaha Milik Desa: Studi Kasus Pada Bumdes Trenggalek

Suprayitno<sup>1</sup>, Siswanto<sup>2</sup> dan Marsono<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Politeknik Keuangan Negara STAN, Prodi D III Akuntansi, email: suprayitno@pknstan.ac.id

<sup>2</sup>Politeknik Keuangan Negara STAN, Prodi D III Akuntansi, email: siswanto@pknstan.ac.id

<sup>3</sup>Politeknik Keuangan Negara STAN, Prodi D III Akuntansi, email: marsono@pknstan.ac.id

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyusunan laporan keuangan pada badan usaha milik desa (BUMDes) sudah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi atau belum. Penelitian ini dilakukan terhadap 30 BUMDes secara umum dan dua BUMDes secara khusus di Kabupaten Trenggalek. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus terkait proses bisnis penyusunan laporan keuangan selama sembilan bulan pada dua BUMDes dan melihat data sampel laporan keuangan BUMDes lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan BUMDes pada Kabupaten Trenggalek secara umum belum disusun sesuai dengan standar yang berlaku. Penelitian ini mengusulkan beberapa solusi yang dapat dilakukan, antara lain pemerintah daerah mengeluarkan aturan yang mewajibkan BUMDes menyusun laporan keuangan sesuai standar, mengadakan pelatihan-pelatihan kepada pengelola BUMDes, serta kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mendampingi BUMDes dalam menyusun laporan keuangan..*

**Kata kunci:** akuntansi, BUMDes, laporan keuangan

### Abstract

*The research aims to find out whether the preparation of financial reports for village-owned enterprises (BUMDes) has been carried out in accordance with accounting standards or not. The research was conducted in Trenggalek Regency, with 30 BUMDes in general and two BUMDes specifically. The method of research was carried out by adopting qualitative method and using a case study of business process in preparation of financial reports during around nine months at two BUMDes, as well as looking at sample data from other BUMDes financial reports. The research results show that BUMDes financial reports in Trenggalek Regency have generally not been prepared in accordance with applicable standards. This research proposes several solutions that can be implemented, such as the regional government should issue regulations requiring BUMDes to prepare financial reports according to standards, hold training for BUMDes managers, as well as collaborate with universities to assist BUMDes in preparing financial reports..*

**Keywords:** accounting, village-owned enterprises, financial reporting

## 1. Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Desa saat ini merupakan salah satu instrument penggerak perekonomian di daerah. Sejak Undang-Undang [1] tentang Desa ditetapkan, setiap desa perlahan-lahan mulai membentuk BUMDes di wilayahnya masing-masing. Dalam penjelasan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUMDes dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Alfiansyah (2021) menyebutkan bahwa status badan hukum BUMDes bisa berdampak mempromosikan potensi daerah dan mempercepat perbaikan ekonomi daerah. [2]

BUMDes dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Saat ini BUMDes belum berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan temuan Rahmawati (2020) yang mengungkapkannya bahwa berkaitan pengelolaan BUMDes di Kabupaten Bandung Barat, masih terdapat gap antara kepentingan dengan kinerja yang berdampak bahwa kinerja BUMDes saat ini, sehingga kinerja BUMDes kurang dari harapan yang diinginkan [3]. Sebaliknya, pada penelitian Zakariya, n.d. (2020) menyatakan bahwa BUMDes mempunyai peran dalam pengembangan ekonomi pedesaan, dimana salah satu upayanya dengan mendorong BUMDes terlibat sebagai penyedia bahan makanan pokok di desa.

BUMDes diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Jika kegiatan usaha BUMDes berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Penjelasan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). BUMDes memiliki peran penting dalam rangka menggerakkan perekonomian masyarakat di lingkungan desa. Keberadaannya diharapkan mampu mendukung dan memperkuat pembangunan desa tempat BUMDes tersebut berada. Harapan yang tinggi dari peran BUMDes tersebut didukung dan mulai diupayakan terwujud dengan program pemerintah yang dari tahun ke tahun mencoba memberdayakan BUMDes.

Tentu saja, apa yang diharapkan dan terus dilaksanakan oleh pemerintah tidak serta merta terwujud secara instan. Sebagaimana dari ribuan BUMDes yang telah berdiri, tidak semuanya berhasil menjalankan perannya dengan baik. Penelitian BPK (2018) menunjukkan bahwa terdapat 1034 BUMDes yang tidak menyampaikan laporan, 864 BUMDes belum tertib dalam penatausahaan dan pelaporan, serta 585 BUMDes belum didukung oleh pengelola yang kompeten. Kondisi tersebut membuat beberapa BUMDes menjadi stagnan setelah berdiri, tidak bisa mencapai visi dan misi yang seharusnya dicapai dari pendirian BUMDes. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan pada Kabupaten Tuban yang menunjukkan bahwa hanya terdapat 13 BUMDes yang memiliki laporan keuangan dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing (Supeno,2023) [5].

Salah satu permasalahan krusial yang dihadapi oleh kebanyakan BUMDes adalah masalah permodalan. Agunggunanto et al., n.d.) menyebutkan bahwa keterbatasan modal merupakan salah satu kendala yang dihadapi BUMDes. Dengan modal yang terbatas, BUMDes kurang mampu menjalankan jenis usaha beragam. Permasalahan pada level nasional tersebut juga terjadi pada BUMDes di Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki paling banyak kabupaten/kotamadya di Indonesia, yaitu 29 kabupaten dan 9 kotamadya. Saat ini terdapat 6.363 BUMDes di Jawa Timur dengan 9.578 unit usaha BUMDes [7].

Setiap tahun, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur mengadakan lomba BUMDes. Adapun pada tahun 2022 kegiatan tersebut diikuti oleh 24 BUMDes yang berasal dari 23 Kabupaten dan Kota. Aspek yang dinilai pada lomba ini ialah aspek kelembagaan, pengelolaan usaha, kinerja keuangan, hasil dan dampak, kemitraan,

pertanggungjawaban, pelaporan, pengawasan dan pembinaan. Pada Lomba tahun 2022, Kabupaten Trenggalek mengirimkan BUMDes Bangkit Mandiri Desa Depok untuk mengikuti lomba.

Pada tahun 2022, penulis meneliti dua BUMDes di Kabupaten Trenggalek dengan kategori BUMDes “Maju” berdasarkan penilaian Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Trenggalek. Penelitian dilakukan untuk mengkonfirmasi kinerja aspek akuntabilitas dan administrasi keuangan BUMDes, khususnya berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan BUMDes. Jika ditinjau dari sisi usia pendiriannya, BUMDes di Kabupaten Trenggalek telah lama berdiri sejak awal pelaksanaan era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Berdasarkan informasi pemangku kepentingan BUMDes di Kabupaten Trenggalek, beberapa BUMDes berdiri sejak tahun 2001. Adapun fokus usaha BUMDes pada waktu itu terkait penyaluran modal usaha atau simpan pinjam untuk mendukung usaha masyarakat desa. Berdasarkan pembinaannya, Dinas PMD Kabupaten Trenggalek saat ini, menaruh perhatian yang cukup besar terhadap perkembangan dan tata kelola BUMDes pada wilayahnya, hal ini ditandai dengan pembentukan BUMDes *Center*, mengalokasikan tenaga pendamping BUMDes yang dibiayai dari APBD dan menetapkan kewajiban seluruh BUMDes untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi dan aplikasi.

## 1. Tinjauan Literatur

### 1.1. Teori Keagenan

Menurut Jensen & Meckling, (1976), hubungan keagenan muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang dalam pengambilan keputusan kepada orang lain (agen) tersebut. Manajer sebagai pengelola perusahaan tentunya mengetahui lebih banyak informasi internal dan prospek perusahaan di waktu mendatang dibandingkan pemilik modal atau pemegang saham. Dengan demikian, sebagai pengelola, manajer memiliki kewajiban memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Akan tetapi, informasi yang disampaikan oleh manajer terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Pengelola BUMDes dapat dikategorikan sebagai manajer dalam sebuah entitas, sementara itu kepala desa (*ex-officio*) merupakan pemilik dari bumdes tersebut. Permasalahan yang mungkin timbul dalam hubungan keagenan di BUMDes ialah pengelola BUMDes mungkin kurang menyadari pentingnya menyusun laporan keuangan guna kepentingan pemilik dan pemangku kepentingan yang lain. Permasalahan ini secara umum disebabkan karena pengelola BUMDes secara umum tidak memiliki kompetensi dalam bidang laporan keuangan.

### 1.2. Akuntansi dan Laporan Keuangan

Akuntansi adalah sebuah proses yang terdiri dari kegiatan mencatat, mengolah, melaporkan, serta menginterpretasikan kegiatan-kegiatan yang bernilai ekonomis dari suatu entitas. menurut Martani et al., (2019) empat hal penting dari akuntansi ialah:

1. Input akuntansi, yaitu transaksi yang bersifat keuangan. Transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang harus disertai bukti valid yang menyertainya.
2. Proses, merupakan serangkaian kegiatan untuk merangkum transaksi menjadi laporan. Kegiatan itu terdiri dari proses mengidentifikasi, mencatat, menggolongkan, dan mengikhtisarkan transaksi tersebut untuk menjadi laporan keuangan.
3. *Output* akuntansi adalah informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan, dimana laporan keuangan tersebut merupakan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

4. Pengguna informasi keuangan adalah pihak-pihak yang memakai laporan keuangan untuk keperluan mengambil keputusan.

Kieso et al., (2014) mendefinisikan akuntansi sebagai sebuah sistem dengan input data/informasi dan *output* berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal entitas. Menurut Romney dkk (2020) akuntansi merupakan pencatatan yang sistematis dan komprehensif atas transaksi keuangan suatu organisasi.

## 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan melalui beberapa upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur dan mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan (Creswell, 2015) [12]. Alasan pemilihan metode kualitatif dalam penelitian ini karena laporan keuangan pemerintah merupakan suatu informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan. Dengan menggunakan metode kualitatif ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara utuh tentang proses bisnis.

Pendekatan yang dilakukan dengan melakukan dokumentasi, wawancara, diskusi kelompok terbatas, dan observasi terhadap dua BUMDes di Kabupaten Trenggalek. Observasi dilakukan selama kurang lebih sembilan bulan sejak bulan Mei 2022 s.d. Januari 2023. Karena masih terdapat pemberlakuan PPKM dari pemerintah, observasi yang dilakukan tidak seluruhnya dilakukan secara langsung. Observasi secara langsung/fisik dilakukan sebanyak dua kali, sementara sisanya dilakukan dengan cara daring melalui media *video conference* dan berbagi pesan singkat secara rutin. Secara rinci, metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

### 1. Mengumpulkan Data Profil BUMDes

Kegiatan yang dilakukan dengan koordinasi dan wawancara dengan Dinas PMD Kabupaten Trenggalek untuk memperoleh data profil BUMDes, melakukan penelusuran data melalui media Internet. Data yang diambil di jaringan Internet dilakukan melalui situs-situs resmi dari provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Trenggalek, serta kanal youtube BUMDes terkait. Data yang diperoleh antara lain berupa profil BUMDes, peraturan desa tentang pendirian BUMDes, AD/ART BUMDes, catatan keuangan BUMDes, data transaksi BUMDes, omzet dalam beberapa tahun terakhir, serta kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa (Pades), dll.

### 2. Melakukan Pengumpulan Data Proses Bisnis

Pada tahapan ini, penelitian dilakukan dengan cara melihat proses bisnis BUMDes di lokasinya masing-masing. Penulis secara langsung hadir di Dinas PMD Kab. Trenggalek dan dua BUMDes. Pada pengamatan di unit usaha BUMDes, penulis bertemu, berdiskusi dengan penasihat, pengelola dan pengawas BUMDes baik melalui diskusi terbatas maupun diskusi umum. Pemahaman proses bisnis pencatatan transaksi, hingga penyusunan laporan keuangan dan pengarsipan dokumen sumber dilakukan penulis di lokasi BUMDes. Catatan dan data baik dalam bentuk cetak, elektronik, didokumentasikan menggunakan perangkat telepon pintar. Di salah satu unit usaha toko, pengamatan pencatatan transaksi penjualan dilakukan dengan membaca dan mengamati basis data yang tersimpan pada aplikasi toko BUMDes.

Selain pengamatan dan wawancara langsung di lokasi BUMDes, penulis juga melakukan penggalian proses bisnis dan pengumpulan data secara *online*/daring dengan media *video conference* dan berbagi pesan singkat. Pertemuan daring melalui *video conference* dilakukan secara periodik, setiap bulan sekitar dua pertemuan. Sehingga pada penelitian ini, pertemuan dilakukan kurang lebih 20 pertemuan, dengan durasi rata-rata 120 menit.

### 3. Mempelajari Literatur-Literatur Terkait

Tahap ini, penulis mempelajari literatur-literatur terkait dengan teori akuntansi, antara lain prinsip-prinsip akuntansi, teori basis pencatatan akuntansi dan standar akuntansi terkait. Selain literatur akuntansi, beberapa peraturan terkait desa dan BUMDes juga dipelajari agar lebih cepat memahami kondisi BUMDes di lapangan.

#### 4. Melakukan Analisis Dan Menyusun Rekomendasi

Berdasarkan data yang dikumpulkan pada tahapan sebelumnya, penulis melakukan analisis atas fenomena, kendala dan permasalahan yang dihadapi BUM Desa. Selanjutnya mengidentifikasi temuan kritis dan urgen yang perlu dipecahkan masing-masing BUM Desa. Berdasarkan temuan tersebut penulis merancang rekomendasi yang tepat bagi para pemangku kepentingan di BUMDes, khususnya yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan BUMDes. Rekomendasi berupa perbaikan sistem dan proses bisnis administrasi keuangan BUMDes yang antara lain berupa metode dan prosedur pencatatan transaksi keuangan, penggunaan aplikasi akuntansi, rancangan catatan dan data keuangan BUMDes, pelatihan akuntansi pada pengelola BUMDes, serta penyiapan laporan keuangan BUMDes yang siap digunakan untuk pertanggungjawaban keuangan BUMDes ke para pemangku kepentingan.

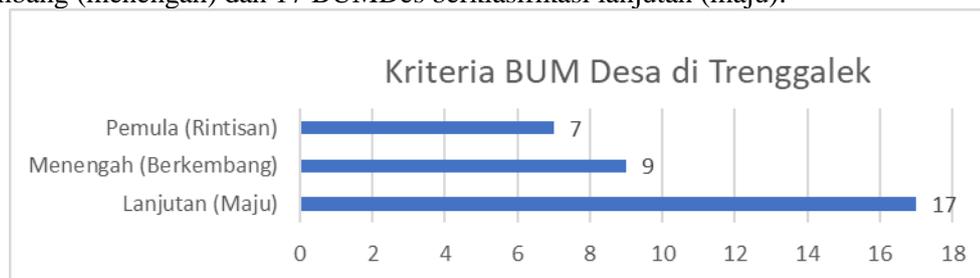
#### 5. Memberikan Masukan Dan Saran

Berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan, pada pertemuan diskusi terbatas, penulis memaparkan masukan bagi perbaikan penyelenggaraan administrasi keuangan BUMDes di hadapan pejabat di Dinas PMD Kab.Trenggalek, penasihat, pengelola dan pengawas BUM Desa. Pada pertemuan tersebut, sekaligus didapatkan umpan balik dari masukan dari pemangku kepentingan di Kab. Trenggalek.

### 3. Hasil dan Pembahasan

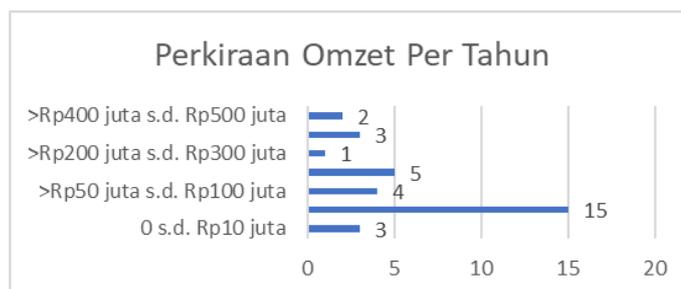
#### 3.1. Profil BUMDes pada Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan data yang dihimpun dari survei Dinas PMD Kab. Trenggalek, sebagaimana nampak pada gambar 1, sebanyak 33 BUMDes di Trenggalek dapat diklasifikasikan menjadi tiga klasifikasi, yaitu 7 BUMDes berklasifikasi pemula (rintisan), 9 BUMDes berklasifikasi berkembang (menengah) dan 17 BUMDes berklasifikasi lanjutan (maju).



Gambar 1. Kriteria BUM Desa di Trenggalek

BUMDes tersebut sebagian besar berdiri pada tahun 2001 sedangkan sebagian lainnya berdiri pada tahun setelah 2001 sampai dengan 2021. Sebagian besar BUMDes tersebut, diperkirakan memiliki omzet per tahun tidak lebih dari 50 juta rupiah. Meski demikian, terdapat 11 BUMDes yang memiliki omzet lebih dari 100 juta rupiah per tahun (gambar 2).



Gambar 2. Omzet BUM Desa di Kab. Trenggalek

Dari ke-33 BUMDes tersebut telah memiliki pengurus yang bertanggung jawab dalam masalah pembukuan. Hanya saja, hanya 8 BUMDes yang pengurusnya memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi sedangkan 25 BUMDes lainnya tidak berlatar belakang pendidikan di bidang akuntansi.

Dilihat dari kesiapan peralatan untuk pembukuan, 27 BUMDes telah memiliki komputer/laptop untuk menyelenggarakan pencatatan/pembukuan. Hanya 6 BUMDes yang tidak memiliki peralatan tersebut. Terdapat 10 BUMDes yang sudah menggunakan aplikasi pembukuan, dan sisanya sebanyak 23 BUMDes belum menggunakan aplikasi tertentu sebagaimana terlihat pada gambar 6.

### 3.2. Profil BUMDes Yang Diteliti

Berdasarkan 33 BUM Desa di Kabupaten Trenggalek, penulis melakukan wawancara mendalam dan observasi atas proses bisnis 2 BUMDes yang masuk ke dalam kategori memiliki omzet terbesar. Hasil wawancara dan observasi ialah sebagai berikut:

#### a. BUMDes I

BUMDes I didirikan pada tanggal 12 Maret 2018. BUMDes ini memiliki empat unit usaha utama, yaitu unit usaha simpan pinjam, unit usaha persewaan/perantara, unit usaha perdagangan, dan unit usaha wisata. Meskipun demikian, saat ini baru unit usaha perdagangan dan simpan pinjam yang sudah beroperasi dengan baik. Unit wisata belum optimal karena ketika terjadi pandemi sangat dihentikan operasional dan saat ini masih sedikit pengunjungnya sehingga menjadi kurang terawat.

Berdasarkan wawancara dengan para pengurus, diketahui bahwa tidak ada dari pengurus BUMDes yang memiliki latar belakang pendidikan Akuntansi. Saat ini, BUMDes telah membuat laporan kinerja BUMDes akhir tahun dengan menggunakan pembukuan uang kas masuk dan keluar, dengan basis kas (bukan akrual) serta belum mengikuti standar akuntansi yang sesuai. Untuk usaha simpan pinjam, BUMDes telah menggunakan pencatatan berbasis excel yang telah dirancang oleh salah satu perguruan tinggi ternama dan telah memadai. Para pengurusnya telah menggunakan aplikasi tersebut selama setahun karena pada awalnya, usaha utama dari BUMDes tersebut ialah simpan pinjam. Namun aplikasi tersebut belum bisa menghasilkan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dsb.

Dengan mulai munculnya unit usaha lain, yaitu minimarket, BUMDes memerlukan aplikasi tersendiri untuk menyusun laporan keuangan, yaitu aplikasi *point of sales* (POS). Namun, aplikasi POS ini hanya sebatas digunakan untuk menghimpun transaksi penjualan toko, dan belum bisa menghasilkan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dll. Adapun beberapa laporan keuangan seperti laporan laba rugi disusun secara terpisah dengan bantuan aplikasi spreadsheet. Adapun perhitungan, format penyajian, klasifikasi akun/CoA masih sederhana sehingga belum menggambarkan kondisi format penyajian berdasarkan standar akuntansi. BUMDes 1 belum bisa menghasilkan neraca, namun demikian, BUMDes melaporkan jenis dan harga perolehan beberapa aset dalam lembar laporan. Namun belum tersusun secara sistematis dan memadai.

## b. BUMDes II

BUMDes II didirikan pada 4 Mei 2019. BUMDes ini memiliki lima unit usaha utama yaitu perkreditan, pengelolaan pasar, barang dan jasa, penyewaan, dan unit usaha simpan pinjam. Berdasarkan wawancara dengan para pengurus, tidak terdapat pengurus BUM Desa yang memiliki latar belakang pendidikan Akuntansi. BUMDes juga telah membuat laporan keuangan akhir tahun dengan menggunakan basis kas (bukan akrual) dan belum mengikuti standar akuntansi yang sesuai.

Dengan mulai munculnya unit usaha lain, yaitu barang dan jasa, persewaan dan yang lainnya, BUMDes II memerlukan aplikasi tersendiri untuk menyusun laporan keuangan. Secara prosedur akuntansi, pengelola BUMDes telah melakukan pencatatan transaksi keuangan di seluruh unit usaha dengan bantuan aplikasi spreadsheets. Proses pembukuan dilakukan dengan melakukan penjurnalan transaksi keuangan, posting ke buku besar, dan penyusunan neraca dan laporan laba rugi. Pekerjaan tersebut dilakukan oleh Direktur Keuangan BUMDes.

### 3.3. Analisis Praktik Pembukuan BUMDes

Berdasarkan data yang diperoleh penulis mengenai prosedur pencatatan transaksi keuangan dan penyiapan laporan keuangan BUM Desa, terdapat sejumlah kondisi permasalahan yang secara umum dapat dilihat pada tabel 1. Adapun permasalahan tersebut dapat diungkapkan secara rinci sebagai berikut:

- a. Laporan keuangan yang telah disusun pada tahun 2021 belum menggunakan kaidah akuntansi sesuai standar. Laporan keuangan BUMDes belum sepenuhnya mengacu standar akuntansi yang berlaku, dalam hal lingkup omset dan skala usaha, seharusnya mengikuti standar akuntansi EMKM (entitas mikro dan kecil menengah). Adapun rincian lebih lanjut sebagai berikut:
  - 1) Basis pencatatan masih berupa basis kas  
Seluruh transaksi yang terjadi, baik di BUMDes pusat maupun di unit usaha, masih menggunakan basis kas, yang artinya bahwa BUMDes mencatat transaksi apabila sudah ada uang kas yang diterima BUM Desa atau uang kas yang dibelanjakan oleh BUM Desa. Sebagai contoh sebagai berikut:
    - Bumdes belum melakukan penyesuaian terhadap aset dan kewajibannya, sebagai contoh, belum menyusutkan aset tetap, belum mencadangkan piutang tidak tertagih, belum mengakui utang gaji, dan lain-lain.
    - Nilai penjualan, pembelian serta penerimaan/pengeluaran kas tata cara pencatatannya belum menggunakan logika akuntansi akrual sehingga memerlukan penerjemahan lebih lanjut ketika dikonversi ke catatan akuntansi.
  - 2) Laporan keuangan yang dihasilkan belum mencakup seluruh jenis laporan keuangan yang seharusnya disusun. BUMDes I baru menyusun laporan laba rugi dan belum menghasilkan neraca. Sedangkan BUMDes II sudah menyusun kedua jenis laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi dan neraca, Namun demikian, laporan kedua BUMDes tersebut masih kurang memenuhi format dan penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi.
  - 3) Ketidaktepatan dalam penyajian pos-pos pada laporan keuangan BUMDes.  
Pada laporan keuangan yang disajikan BUMDes terdapat pos/akun yang seharusnya tidak perlu disajikan. Sebagai contoh, pada laporan laba rugi BUMDes, nilai agregat jumlah pendapatan didistribusikan pada pos-pos alokasi operasional BUMDes, bagi hasil BUMDes, pemupukan modal, dll sehingga secara sekilas kelihatan laba bersih BUMDes Rp0 (gambar 3).



merupakan pegawai pada BUMDes. Mekanisme penggajian atas pegawai BUMDes tersebut, secara umum ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan menggunakan persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh. Sistem penggajian ini, dapat membuat dua implikasi yang saling bertolak belakang, yaitu meningkatkan kinerja pegawai atau sebaliknya menimbulkan demotivasi pegawai. Tentu saja terdapat latar belakang yang melandasi mengapa bisa menimbulkan implikasi yang kontradiktif tersebut.

- 2) BUMDes seringkali digunakan Pemerintah Desa untuk membantu pelaksanaan program desa. Sebagaimana Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMDes juga dapat digunakan oleh Pemerintah Desa untuk membantu pelaksanaan program-program desa (*public service obligation/PSO*). Hal ini membuat BUMDes menjadi kurang kompetitif dan sulit untuk berkembang dari sisi bisnis, meskipun BUMDes sering mendapat bantuan dari Pemerintah.
- 3) BUMDes sering melakukan program-program yang tidak sejalan dengan semangat kemajuan perkembangan bisnis BUMDes. Sebagai contoh mengadakan kegiatan-kegiatan bazar yang di dalamnya terdapat pembagian *doorprize*, penjualan produk dengan harga promo, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi beban (*expense*) bagi BUMDes. Karena menjadi beban operasional usaha, gaji yang diterima oleh pegawai BUMDes akan lebih kecil. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mengabaikan aspek studi kelayakan bagi BUMDes, yaitu apakah kegiatan tersebut dalam jangka panjang dapat menambah pendapatan BUMDes atau tidak. Seringkali kegiatan tersebut hanya menambah beban keuangan dan tidak menambah pendapatan di masa yang akan datang.
- 4) Pengelola BUMDes belum begitu paham dengan kewajiban perpajakan BUMDes. Hal ini dapat berakibat munculnya denda pajak bagi BUMDes, dan beban keuangan Bumdes menjadi lebih berat.

Berdasarkan pembahasan di atas, pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pada BUMDes masih belum memenuhi standar akuntansi. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia yang dimiliki BUMDes secara umum tidak memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi. Kondisi tersebut selaras dengan hasil penelitian Widiastuti dan Khoiriawati,(2022) yang meneliti proses akuntansi pada BUMDes Makmur Sejahtera Desa Jabalsari Kecamatan Sumbergempol, BUM Desa tersebut juga belum melakukan pencatatan akuntansi yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan. Selain itu terdapat kecenderungan bahwa pengelola BUMDes mencatat transaksi berdasarkan proses bisnis yang dilakukan oleh pengelola yang lama, sehingga pengelola BUMDes tidak dapat memahami substansi dari laporan keuangan yang mereka hasilkan. Di sisi yang lain, tata kelola dan sistem keuangan BUMDes di Kabupaten Trenggalek yang masih sangat sederhana menyebabkan penyajian laporan keuangan yang belum akurat sehingga akuntabilitasnya masih sangat lemah. Hal ini sejalan dengan penelitian Haeruddin dan Mariana (2021) [14] pada BUMDes di Kabupaten Takalar.

Berdasarkan kendala dan permasalahan akuntabilitas dan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pada BUMDes tersebut, ada beberapa rekomendasi yang ditawarkan, antara lain:

1. Pemerintah daerah dapat mengeluarkan aturan mengenai kewajiban bagi BUMDes untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi.
2. Kegiatan-kegiatan pelatihan penyusunan laporan keuangan bagi bumdes perlu digalakkan kembali.
3. Kompetensi pemdamping khusus BUMDes diperkuat dengan kompetensi akuntansi melalui kegiatan pelatihan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
4. Membuat klinik BUMDes atau BUMDes centre sebagai tempat pembinaan, pengkaderan, dan penampingan pengelola keuangan BUMDes.

5. Bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk dapat memberikan pendampingan dalam menyusun laporan keuangan. Perguruan tinggi dapat mengambil manfaat kegiatan tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana hasil dari kegiatan yang telah dilakukan pada BUMDes di Kabupaten Cianjur yaitu peningkatan pemahaman dan keterampilan pengelola BUMDes mengenai akuntansi dasar dan penghitungan harga pokok, dan pada akhirnya BUMDes berhasil menyusun laporan keuangan periode 2021 sesuai standar akuntansi yang berlaku (Marsono, Siswanto dan Suprayitno, 2023). [15]

#### 4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa BUMDes pada Kabupaten Trenggalek secara keseluruhan masih belum melaksanakan pencatatan transaksi keuangan berdasarkan standar akuntansi yang seharusnya. Pencatatan transaksi yang saat ini dilakukan oleh BUMDes masih sebatas pencatatan pembukuan dengan sistem Buku Kas Umum. Hal tersebut menjadikan BUMDes kesulitan untuk mengukur perkembangan bisnis secara akurat dan andal.

Fenomena yang ditemukan pada BUMDes juga menunjukkan bahwa BUMDes belum melakukan pencatatan transaksi berdasarkan basis akrual sebagai dasar pencatatan pada standar akuntansi yang berlaku. Pencatatan akuntansi dengan dasar akrual saat ini merupakan basis pencatatan yang lebih baik dibanding basis kas karena dapat memberikan informasi keuangan yang lebih akurat dan transparan. Sebagaimana hasil penelitian Sudarmiati dkk (2019) [16] yang menyatakan bahwa kebanyakan perusahaan menggunakan basis akrual dan meninggalkan basis kas. Basis akrual juga memiliki beberapa kelebihan yang membuat hasil dari laporan keuangan menjadi lebih baik lagi.

Selain itu, belum semua BUMDes di Kabupaten Trenggalek yang menyusun laporan keuangan lengkap seperti neraca dan laporan laba rugi, ketidaktepatan format dan penyajian pos-pos/akun pada laporan keuangan. Adapun secara nonteknis, kegiatan seremonial BUMDes seperti bagi-bagi *doorprize* dan promo berpotensi menaambah beban operasional BUM Desa. Hal ini dapat berdampak berkurangnya motivasi pengurus BUMDes.

#### Daftar Pustaka

- [1] Republik Indonesia, "UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa," 2014.
- [2] A. Alfiansyah, "Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, vol. 5, no. 2, Mar. 2021, doi: 10.58258/jisip.v5i2.1991.
- [3] E. Rahmawati, "ANALISIS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, vol. 25, no. 1, pp. 1–13, Apr. 2020, doi: 10.35760/eb.2020.v25i1.2386.
- [4] R. Zakariya, "Optimalisasi Peran BUM Desa dalam Pengembangan Ekonomi Perdesaan di Masa Pandemi Covid-19<sup>^</sup>," *Jurnal Ekonomi Indonesia* •, vol. 9, pp. 279–294.
- [5] A. Supeno, "Analisis Implementasi SAK ETAP Pada Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Pada BUMDes Di Desa Tuban)," *Jurnal Kendali Akuntansi*, vol. 1, no. 4, pp. 2986–4399, 2023, doi: 10.59581/jka-widyakarya.v1i4.1258.
- [6] E. Y. Agunggunanto *et al.*, "PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)."
- [7] "Data Desa Center." <https://datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id/> (accessed Jun. 23, 2023).
- [8] A. Iswoyo and Y. Fauzuddin, "Laporan keuangan BUM Desa: kendala, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan," 2023.
- [9] Michael. C. Jensen and H. M. W., "Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure," *J financ econ*, vol. 3, pp. 305–360, 1976.
- [10] Martani, Veronica, Wardhani, Farahmita, and Tanujaya, *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Edisi 2 Buku 1*, 2nd ed. Jakarta: Salemba Empat, 2019.

- [11] Kieso, Donald.E, Jerry J. Weygandt, and Terry D. Warfield, *Intermediate Accounting*, 2nd ed. John Willey & Sons, 2014.
- [12] J. P. Creswell, *Research Design. Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Edisi Ketiga*, 3rd ed. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- [13] E. Widiastuti and N. Khoiriawati, “Kesiapan Bumdes Makmur Sejahtera Desa Jabalsari Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung untuk Mengimplementasikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat,” *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting*, vol. 4, no. 1, pp. 55–73, Nov. 2022, doi: 10.31539/budgeting.v4i1.4127.
- [14] H. Haeruddin and L. Mariana, “ANALISIS SISTEM AKUNTANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) (Studi Kasus : BUM Desa di Kec. Galesong Utara Kabupaten Takalar),” *AkMen JURNAL ILMIAH*, vol. 18, no. 1, pp. 36–45, Apr. 2021, doi: 10.37476/akmen.v18i1.1351.
- [15] M. Marsono, S. Siswanto, and S. Suprayitno, “Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sektor Manufaktur,” *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, vol. 8, no. 1, pp. 1–9, Feb. 2023, doi: 10.30653/jppm.v8i1.230.
- [16] N. K. D. Sudarmiati, N. K. A. Y. Parwati, P. W. Hardyanti, and K. A. Ratmadi, “PENERAPAN BASIS AKRUAL PADA PERUSAHAAN BUMDES DALAM KEAKURATAN LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus pada BUMDes Dwi Amertha Sari Tahun 2017),” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, vol. 7, no. 2, Sep. 2019, doi: 10.23887/jinah.v7i2.19962.